

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Seiring dengan upaya pemerintah dalam meningkatkan profesionalisme aparatur negara serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) di Indonesia terjadi tuntutan reformasi yaitu publik menginginkan adanya pengelolaan dalam keuangan negara. Sebelumnya diketahui bahwa sebelum era reformasi sistem yang digunakan oleh pengelola keuangan negara yaitu sistem *single entry* dan tidak ada standar pencatatan transaksi pemerintah untuk keperluan anggaran. Tuntutan publik terhadap pengelolaan keuangan pemerintah pada reformasi bidang keuangan yaitu agar mengacu pada *clean governance*, transparan dan akuntabel, sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang berlaku dan sebagai bentuk laporan pertanggungjawaban pelaksanaan keuangan pemerintahan.

Dengan demikian pengelolaan keuangan di Indonesia diatur oleh Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Pasal 32 mengamanatkan bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban APBN/APBD disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah yang kemudian diterbitkan PP No.24 Tahun 2004 tentang

Standar Akuntansi Pemerintah dan disempurnakan dengan PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah berbasis akrual.

Badan Pusat Statistik adalah lembaga pemerintah non departemen yang bertanggung jawab langsung kepada presiden. Berdasarkan UU Nomor 16 Tahun 1997 memuat tentang jenis statistik berdasarkan tujuan pemanfaatannya, hasil statistik yang diselenggarakan, sistem statistik nasional yang andal, efektif dan efisien, serta terkait forum masyarakat statistik yang dibentuk sebagai wadah untuk menampung aspirasi masyarakat statistik.

Tugas, fungsi dan kewenangan BPS telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 86 tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik dan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2008 tentang organisasi dan tata kerja Badan Pusat Statistik. Dalam melaksanakan tugas pemerintahan di bidang statistik, BPS melaksanakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Salah satu fungsi BPS selain pembinaan dan fasilitasi terhadap kegiatan instansi pemerintah dibidang kegiatan statistik, BPS memiliki fungsi sebagai penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi umum dibidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, keuangan, kearsipan, kehumasan, hukum, perlengkapan dan rumah tangga.

Instansi pemerintahan harus terus memperbaiki sistem pembukuan, sistem teknologi informasi, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, menata kekayaan instansi, serta mematuhi peraturan yang berlaku guna terus meningkatkan kualitas laporan keuangan.

Badan Pemeriksa Keuangan dalam pemeriksaannya pun menemukan beberapa kasus kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan yang umum terjadi, salah satunya adalah sistem informasi akuntansi dan pelaporan yang kurang memadai.

Seperti kita ketahui bahwa total volume APBN/D dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan yang luar biasa. Untuk itu pemerintah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan Sistem Informasi Akuntansi untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan dan penyajian laporan keuangan.

Dalam peraturan pemerintah No. 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) yaitu Sistem Pengendalian Internal adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Pada prinsipnya pengendalian persediaan didalam suatu perusahaan dapat mempermudah atau memperlancar jalannya operasi perusahaan yang harus dilakukan secara berturut-turut dan tertib.

Pengendalian internal atas persediaan diharapkan dapat menciptakan aktivitas pengendalian terhadap kegiatan dan pelayanan Badan Pusat Statistik yang efektif dalam menentukan jumlah persediaan optimal yang dimiliki, mencegah berbagai tindakan pelanggaran dan penyelewengan yang dapat merugikan perusahaan, pelanggaran atas kebijakan yang ditetapkan atas persediaan, serta memberikan pengamatan fisik terhadap persediaan dari pencurian dan kerusakan. Dengan demikian, agar pengendalian internal berjalan baik maka dibutuhkan sistem informasi akuntansi persediaan.

Pengendalian internal atas persediaan diharapkan dapat menciptakan aktivitas pengendalian pada instansi agar efektif dalam menentukan jumlah persediaan optimal yang dimiliki instansi, mencegah berbagai tindakan pelanggaran penyalahgunaan yang dapat merugikan instansi, pelanggaran kebijakan yang ditetapkan atas persediaan serta memberikan pengamatan fisik terhadap persediaan dari kerusakan dan kehilangan.

Kurangnya pengamatan dalam pengendalian internal terhadap persediaan akan mengakibatkan persediaan di gudang menumpuk sehingga pemakaiannya kurang optimal, bahkan jika kegiatan yang berkaitan dengan persediaan tersebut telah selesai maka barang persediaan tersebut dikategorikan kedalam barang usang.

Menurut Peraturan Pemerintah mengenai persediaan sesuai PSAK 14 tahun 2015 mengatur bahwa, persediaan harus diukur berdasarkan biaya atau nilai realisasi netto, mana yang lebih rendah. Dengan demikian, dalam menentukan persediaan, baik biaya maupun nilai realisasi netto harus ditentukan terlebih dahulu. Setelah dibuat perbandingan, nilai terendah dari keduanya digunakan sebagai nilai persediaan.

Menurut pernyataan standar akuntansi pemerintahan dijelaskan bahwa persediaan meliputi barang dan perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan misalnya barang habis pakai dan barang persediaan seperti alat tulis kantor dan alat rumah tangga kantor. Persediaan merupakan pendukung pada perusahaan atau instansi dibidang pelayanan yang tergolong kedalam aset lancar. Persediaan adalah hal penting dalam melaksanakan kegiatan operasional pemerintah.

Dalam proses kegiatan di Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat, pengelolaan persediaan yang terdapat di gudang harus dikelola dengan baik karena jika kelancaran masuk dan keluar barang persediaan serta penyimpanan yang baik dan aman nantinya akan mendukung capaian kinerja yang optimal. Persediaan pada Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat meliputi alat tulis kantor, tinta tulis/stempel, map, pita mesin ketik, alat perekat, barang cetakan (buku pedoman, kuesioner survei, buku publikasi, *leaflet*), kertas HVS, tinta printer, disket, *flash disk* dan bahan komputer, ARK (Alat Rumahtangga Kantor), perlengkapan

lapangan, souvenir kegiatan dalam rangka pelaksanaan survei dan sensus dan alat / bahan untuk kegiatan kantor lainnya.

Berikut ini tabel data persediaan pada Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat tahun 2016 s.d. 2020.

TABEL 1.1
DATA PERSEDIAAN PADA BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI
JAWA BARAT
TAHUN 2016 S.D. 2020

Tahun	Total Nilai Persediaan (Rp)	Total Nilai Persediaan Yang Rusak (Usang) (Rp)	Persentase (%)	Kurang/Lebih dari maksimum Persentase yang ditetapkan perusahaan (1%)
2016	5.243.968.350	89.600	0,0017	Kurang
2017	686.806.326	89.600	0,013	Kurang
2018	1.124.278.854	23.492.081	2,09	Lebih
2019	887.568.194	23.492.081	2,64	Lebih
2020	3.757.908.264	17.633.092	0,47	Kurang
Rata-rata			1,04	Lebih

Sumber : Bagian Umum Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat

Dari data tabel 1.1 diatas terdapat persediaan barang yang rusak atau usang pada Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 dengan nilai rata-rata persentase 1,04 % sehingga melebihi atau tidak sesuai dari maksimum persentase yang ditetapkan oleh perusahaan, hal tersebut menjadi suatu permasalahan

yang disebabkan kurangnya pengendalian internal persediaan pada Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat. Permintaan barang dari *subject matter* fungsi kegiatan dan realisasi penggunaan tidak sesuai atau berlebih sehingga persediaan kegiatan tersebut masih tersisa di gudang dan menjadi barang usang atau rusak karena tidak dipakai. Total persediaan pada tahun 2016 dengan jumlah Rp 5.243.968.350 dan total barang yang rusak menurut pencatatan berjumlah Rp 89.600 dengan persentase 0,0017 % disebabkan kurangnya aktivitas pengendalian dan pemanfaatan barang persediaan pada tahun sebelumnya belum optimal. Pada tahun 2017 total persediaan sejumlah Rp 686.806.326 dan total barang yang rusak menurut pencatatan berjumlah Rp 89.600 dengan persentase 0,013 % (turun) disebabkan karena persediaan yang rusak masih tetap sama dengan tahun 2016. Pada tahun 2018 total persediaan sejumlah Rp 1.124.278.854 dan total barang yang rusak menurut pencatatan berjumlah Rp 23.492.081 dengan persentase 2,09 % (naik) disebabkan karena masih terdapat pegawai yang merangkap tugas sehingga kerusakan yang terjadi tidak dikelola dengan baik serta barang tidak disimpan dengan baik sehingga belum optimal pada saat memeriksa barang sehingga persentase pada tahun 2018 ini melebihi dari maksimum persentase yang ditetapkan oleh perusahaan. Pada tahun 2019 total persediaan sejumlah Rp 887.568.194 dan total barang yang rusak menurut pencatatan berjumlah Rp 23.492.081 dengan persentase 2,64 % (naik) disebabkan karena komunikasi dan informasi mengenai kode atau jenis barang dari user pengelola aplikasi ke bagian user pengelola gudang masih kurang sehingga ketika dilakukan opname fisik barang persediaan terdapat selisih. Karena adanya kurang komunikasi mengenai kode atau jenis barang tersebut persentase pada tahun 2019 ini melebihi dari maksimum persentase yang ditetapkan oleh perusahaan. Pada tahun 2020 total persediaan sejumlah Rp 3.757.908.264 dan total barang yang

rusak menurut pencatatan berjumlah Rp 17.633.092 dengan persentase 0,47 % (turun) disebabkan karena adanya pemisahan tugas dan tanggung jawab bagian sistem dengan bagian gudang yang belum optimal serta pengendalian yang tidak dilakukan secara berkala. Banyak faktor yang belum dikelola dengan baik oleh perusahaan sehingga terjadi kerusakan barang. Dari data diatas dapat diketahui bahwa pada tahun 2016 persediaan yang rusak terendah sebesar Rp 89.600 dan pada tahun 2019 persediaan barang yang rusak tertinggi sebesar Rp 23.492.081 pada Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat yang setiap tahunnya mengalami kenaikan dan penurunan barang rusak berat. Pada tahun 2017 mengalami penurunan, pada tahun 2018 mengalami kenaikan, tahun 2019 mengalami kenaikan dan tahun 2020 mengalami penurunan.

Pada masa pandemi Covid-19, masih terdapat banyak barang persediaan (tas, rompi, topi, name tag dan lain-lain) dari kegiatan Sensus Penduduk 2020 dan survei rutin yang pelaksanaannya ditunda serta barang persediaan yang seharusnya digunakan untuk keperluan sehari-hari perkantoran dikarenakan adanya PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) dan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Sosial Masyarakat), maka para pegawai dihimbau untuk WFH (Work From Home) sehingga masih terdapat banyak barang persediaan di gudang contohnya kertas, balpoint, pensil, toner dan lain sebagainya. Adanya wabah covid-19, bagian bina program Badan Pusat Statistik merevisi anggaran terkait persediaan dengan akun khusus covid yang merupakan akun tertentu yang dimaksudkan untuk belanja penanganan pandemi covid sehingga diperuntukkan kegiatan dan semua pengeluaran pendukungnya yang berkaitan langsung dengan penanganan pandemi dan dampaknya. Persediaan tersebut meliputi pengadaan :

1. Biaya komunikasi dalam bentuk pulsa telepon atau paket data internet untuk ASN dan Anggota TNI/Polri.

2. Biaya karantina/isolasi mandiri instansi pemerintah untuk penanganan covid-19
3. Pengadaan masker/*hand sanitizer*/*face shield*/sarung tangan karet diperuntukkan bagi kegiatan tertentu, termasuk yang dilaksanakan dalam rangka mendukung operasional kantor agar dapat berjalan dengan baik dan mendukung pelayanan serta tidak memenuhi kriteria aset tetap peralatan dan mesin/persediaan.
4. Pengadaan thermogun / thermometer infrared yang memiliki masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun dan nilainya tidak memenuhi satuan minimum kapitalisasi peralatan dan mesin.
5. Pengadaan bilik desinfektan non permanen yang tidak memenuhi kriteria sebagai aset tetap.
6. Pengadaan lisensi aplikasi video conference sampai dengan 1 (satu) tahun.
7. Pembelian vitamin dan penambah daya tahan tubuh.
8. Pembayaran biaya penyemprotan desinfektan dan pelaksanaan rapid test covid19 dengan menggunakan jasa pihak ketiga (dimana pihak ketiga merupakan pihak yang berkompeten untuk memberikan jasa penyemprotan desinfektan dan pelaksanaan rapid test covid19).
9. Pengadaan / pembangunan tempat cuci tangan portabel maupun permanen.

Dari data diatas diketahui bahwa pengendalian internal persediaan pada Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat belum optimal diduga dipengaruhi oleh sistem informasi akuntansi persediaan yang belum optimal. Permintaan persediaan dari *subject matter* fungsi kegiatan dan realisasi penggunaan tidak sesuai atau berlebih sehingga persediaan

kegiatan tersebut masih tersisa di gudang dan menjadi barang usang karena tidak dipakai serta kurangnya pengawasan dan pengendalian pada sistem informasi akuntansi persediaan yang belum optimal.

Menurut Marshal B. Romney dan Paul John Skinbart (2010:140) bahwa :

“Dalam suatu sistem informasi akuntansi terkandung unsur-unsur pengendalian maka baik buruknya sistem informasi akuntansi sangat mempengaruhi fungsi pengendalian internal sebagai dasar pengambilan keputusan yang berkaitan dengan aktivitas perusahaan”.

Sistem Informasi Akuntansi merupakan suatu kumpulan sumber daya yang memproses data dan transaksi sesuai prosedur agar menjadi informasi akuntansi yang akurat, aktual dan berguna untuk para *users* (pengguna) baik didalam maupun diluar perusahaan. Suatu sistem harus terintegrasi dengan baik dalam penerapannya, karena sistem yang baik akan memberikan output yang baik yaitu berupa informasi yang dibutuhkan dan bermanfaat untuk merencanakan dan menjalankan peluang bisnis. Informasi berguna sebagai landasan pengambilan keputusan baik dalam hal keuangan maupun nonkeuangan. Informasi nonkeuangan dapat diperoleh dari internal perusahaan misalnya informasi jumlah persediaan di gudang.

Sistem informasi akuntansi persediaan pada Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat yang belum optimal diduga karena kurangnya ketelitian pegawai dalam mencatat jumlah dan spesifikasi material

persediaan, kurangnya koordinasi user pengelola aplikasi ke bagian user pengelola gudang, dan kurangnya koordinasi terkait permintaan persediaan dari *subject matter* dengan realisasi penggunaan persediaan yang akan digunakan dalam kegiatan. Beberapa hal ini menimbulkan masalah yang cukup rumit seperti :

1. Kurangnya ketelitian dari pegawai dalam melakukan pencatatan dan pengawasan juga kurang ditaatinya sistem yang diterapkan oleh perusahaan.
2. Komunikasi dan informasi mengenai kode atau jenis barang dari user pengelola aplikasi ke bagian gudang masih kurang sehingga ketika dilakukan opname fisik barang persediaan terdapat selisih.
3. Prosedur persediaan dari *subject matter* fungsi kegiatan tidak sesuai sehingga pada saat proses pengolahan persediaan masih tersisa di gudang dan menjadi barang usang atau rusak karena tidak dipakai.

Dari data diatas sistem informasi akuntansi persediaan pada Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat belum optimal. Dengan adanya pengendalian internal persediaan pada Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat dalam pengelolaan persediaan diharapkan dapat membantu meminimalkan kemungkinan resiko-resiko yang dapat terjadi sehingga informasi persediaan dapat diandalkan. Resiko-resiko yang mungkin muncul didalam perusahaan harus dapat terselesaikan dengan cepat agar tidak terjadi permasalahan yang semakin besar dan berlarut-larut, dimana tujuan dari perusahaan akan tercapai sesuai dengan apa yang diharapkan oleh perusahaan. Antara sistem informasi akuntansi persediaan dan pengendalian internal persediaan memiliki hubungan yang saling menunjang, keduanya harus berjalan bersama dalam sebuah perusahaan.

Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat tidak mungkin melaksanakan sistem informasi akuntansi tanpa pengendalian internal yang baik.

Sistem informasi akuntansi merupakan sistem informasi yang berbasis komputerisasi yang mengolah data keuangan yang berhubungan dengan data transaksi dalam siklus akuntansi dan menyajikan dalam bentuk laporan keuangan kepada pihak manajemen keuangan. Sistem informasi akuntansi persediaan sangat penting untuk menyediakan informasi persediaan yang akurat dan *update* sehingga menjadi informasi yang dapat menunjang keefektifan pengendalian internal persediaan yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang ada dan terorganisir secara baik. Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa sistem informasi akuntansi instansi merupakan faktor yang harus menjadi perhatian utama untuk terus menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas.

Dari permasalahan diatas menunjukkan bahwa adanya keterkaitan antara sistem informasi akuntansi persediaan terhadap sistem pengendalian internal persediaan seperti yang telah diungkapkan oleh **Azhar Susanto (2011:640)** “ Jika sistem informasi akuntansi dirancang dengan baik, maka sistem pengendalian yang melekat akan memberikan jaminan bahwa tujuan pengendalian tercapai”.

Berdasarkan uraian tersebut, diketahui pentingnya pengaruh sistem informasi akuntansi persediaan diperlukan untuk menyediakan bukti pencatatan dan pelaporan yang memadai atas seluruh kegiatan persediaan sebagai bahan informasi yang berguna untuk pimpinan pengurus dan pengelola persediaan dalam mengambil keputusan. Hal ini menjadi pertimbangan penulis menguraikan lebih lanjut ke dalam penelitian dengan mengambil judul “**Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi Persediaan Terhadap Pengendalian Internal Persediaan pada Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat**”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, permasalahan yang akan diuji dan dibahas dalam penelitian ini adalah :

1. Sistem informasi akuntansi persediaan di Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat belum optimal.
2. Pengendalian internal persediaan di Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat belum optimal.
3. Persediaan di Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat belum sepenuhnya didukung penatausahaan, pencatatan dan rekonsiliasi barang yang memadai.
4. Pemanfaatan persediaan di Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat belum optimal.
5. Kurangnya penyusunan strategi resiko kehilangan persediaan di Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat belum optimal.
6. Mekanisme penghapusan persediaan barang usang di Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat belum dapat dijelaskan.

1.3 Pembatasan Masalah

Untuk dapat mengarahkan dan memudahkan dalam penelitian yang terfokus sistematis sesuai tujuan yang akan dicapai, penulis membatasi ruang lingkup permasalahan dengan menganalisis pengaruh sistem informasi akuntansi persediaan terhadap pengendalian internal persediaan di Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat.

1.4 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, permasalahan yang akan diuji dan dibahas dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana sistem informasi akuntansi persediaan di Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat.

2. Bagaimana pengendalian internal persediaan di Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat.
3. Seberapa besar pengaruh sistem informasi akuntansi persediaan terhadap pengendalian internal persediaan di Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat.

1.5 Maksud Dan Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dikemukakan diatas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis :

1. Sistem informasi akuntansi persediaan di Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat.
2. Pengendalian internal persediaan di Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat.
3. Besarnya pengaruh sistem informasi akuntansi persediaan terhadap pengendalian internal persediaan di Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat.

1.6 Kegunaan Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

1.6.1 Kegunaan Operasional (Praktis)

Hasil penelitian ini untuk kepentingan ilmu pengetahuan, diharapkan penelitian ini dapat menjadi referensi dan lebih menambah

ilmu dan pengetahuan dalam sistem informasi akuntansi persediaan dan pengendalian internal persediaan baik untuk peneliti maupun perusahaan.

1.6.2 Kegunaan Pengembangan Ilmu (Teoritis)

Kegunaan Pengembangan Ilmu (aspek teoritis) dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi Penulis

Lebih memahami konsep sistem informasi akuntansi persediaan dan pengendalian internal persediaan pada Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat. Serta menambah wawasan peneliti dalam bidang sektor publik.

2. Bagi Perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi yang bermanfaat untuk manajemen pengelola persediaan yang sifatnya mengarah pada perbaikan pengendalian internal persediaan pada Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat agar mampu melaksanakan tugas dan fungsi pengelolaan dengan baik yang menghasilkan laporan persediaan yang berkualitas, serta dapat dijadikan pertimbangan dalam menganalisis seberapa penting pengaruh sistem informasi akuntansi persediaan terhadap peningkatan pengendalian internal persediaan.

3. Bagi Peneliti Lain

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi referensi bagi calon peneliti selanjutnya yang berminat melakukan penelitian lebih lanjut yang lebih luas dan mendalam terkait masalah yang dibahas.